



# **RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2026**



**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
KABUPATEN JEMBRANA  
DISUSUN TAHUN 2025**



BUPATI JEMBRANA  
PROVINSI BALI

KEPUTUSAN BUPATI JEMBRANA  
NOMOR 502/BPBD/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA BADAN PENANGGULANGAN  
BENCANA DAERAH KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2026 DAN PERUBAHAN  
RENCANA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN  
JEMBRANA TAHUN 2025

BUPATI JEMBRANA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang terpadu dan terarah perlu disusun Rencana Kerja Perangkat Daerah pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2026;
  - b. bahwa sesuai ketentuan pasal 125 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan untuk kelancaran pelaksanaan Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Tim;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2026 Dan Perubahan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2025;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang.....

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 76 Tahun 2024 tentang Kabupaten Jembrana di Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 262, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7013);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pelaksanaan Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

10. Peraturan Daerah.....

10. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2016 Nomor 64, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 51) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 5);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2023 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 5)
12. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Semesta Berencana Kabupaten Jembrana Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2024 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2026 Dan Perubahan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2025, dengan susunan keanggotaan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas :

- a. mengumpulkan data dan informasi Rancangan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2026 dan Perubahan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2025;
- b. menyusun dokumen perencanaan sesuai tahapan dan tata cara Rancangan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2026 dan Perubahan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2025;

c. melaksanakan.../.....

- c. melaksanakan pengendalian penyusunan kebijakan dokumen Rancangan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2026 dan Perubahan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2025.

- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertanggungjawab dan melaporkan hasil kerjanya kepada Bupati Jembrana.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Negara.

pada tanggal 16 Desember 2024



Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Wakil Bupati Jembrana di Negara.
2. Ketua DPRD Kabupaten Jembrana di Negara.
3. Kepala Bappeda Kabupaten Jembrana di Negara.
4. Inspektur Kabupaten Jembrana di Negara
5. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Jembrana di Negara.
6. Kepala Bagian Organisasi dan Perpustakaan Setda Kabupaten Jembrana di Negara.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI JEMBRANA  
NOMOR 502 /BPBD/2024  
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN  
RENCANA KERJA BADAN PENANGGULANGAN  
BENCANA DAERAH KABUPATEN JEMBRANA  
TAHUN 2026 DAN PERUBAHAN RENCANA KERJA  
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA BADAN  
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2026  
DAN PERUBAHAN RENCANA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA  
DAERAH KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2025

---

- Ketua Tim : Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jembrana.
- Sekretaris Tim : Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jembrana
- Kelompok Kerja :
1. Pokja Pengumpulan Data dan Informasi
- Koordinator : Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jembrana
- Anggota : 1. Staf Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jembrana
2. Pokja Perumusan Renja.
- Koordinator : Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jembrana
- Anggota : 1. JF Ahli Pertama Perencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jembrana  
2. JF Analis Kebencanaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jembrana  
3. TRC dan Operator Pusdalops Badan Penanggulangan Bencana Daerah



## KATA PENGANTAR

Penyusunan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2026 merupakan kewajiban Badan Penanggulangan Bencana Daerah sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 disusun sebagai pegangan bagi setiap Perangkat Daerah untuk mewujudkan visi dan misi dengan melaksanakan program/kegiatan sebagaimana tertuang dalam APBD Kabupaten Jembrana tahun 2026.

Penyusunan Renja Tahun 2026 ini berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jembrana dan Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2023 Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Daerah. Kami telah berusaha menyusun Renja ini dengan maksimal apabila ada kekurangan dan kelemahannya, maka kami mengharapkan masukan dan saran dari semua pihak guna penyempurnaan. Mudah-mudahan Renja ini dapat dipergunakan atau dimanfaatkan sebagai salah satu dasar pengambilan kebijakan dalam meningkatkan kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jembrana terima kasih.

Negara, 30 Juli 2025

Kepala Pelaksana

Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kabupaten Jembrana,



Irfan Agus Artana Putra, S.Sos

Pembina TK. I

NIP. 19700807 199201 1 003

## DAFTAR ISI

halaman

SK PENETAPAN RENJA .....	i
KATA PENGANTAR .....	ii
DAFTAR ISI .....	iii
BAB I    PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Landasan Hukum .....	2
1.3 Maksud Dan Tujuan .....	4
1.4 Sistematika .....	5
BAB II    HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (Tahun 2024) dan Capaian Renstra Perangkat Daerah .....	11
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah .....	14
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah .....	16
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD .....	17
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat .....	18
BAB III    TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional .....	19
3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah .....	20
3.3 Program dan Kegiatan .....	22
BAB IV    RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH .....	23
BAB V    P E N U T U P .....	26



## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Perencanaan pembangunan daerah sangat penting untuk merumuskan strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang bersifat jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah wajib menyusun Perubahan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan yang akan dijadikan acuan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan satuan kerja perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun ke depan.

Perencanaan pembangunan perlu didasarkan pada pemahaman data dan informasi yang akurat, utuh, lengkap dan komprehensif tentang potensi daerah, penguatan komunikasi, koordinasi dan konsultasi secara terus menerus dengan para pemangku kepentingan. Dengan demikian akan menghasilkan pembangunan daerah yang sesuai dengan tujuan yang dikehendaki dan dilaksanakan secara sistematis mulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan dan pemeliharaan hasil-hasilnya.

Melalui Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Pasal 27 ayat (1) menyatakan bahwa Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) menyusun Renja-SKPD yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jembrana merupakan perencanaan tahunan yang memuat Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan disusun sebagai wujud komitmen jajaran dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam tujuan dan sasaran.

Untuk mewujudkan Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan dalam Renja ini, maka



dibuat Rencana Kerja Tahunan (RKT) dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) secara proporsional dan terukur serta menentukan jenjang tanggungjawab terhadap keberhasilan maupun kegagalan dalam pelaksanaannya antara lain : staf dan eselon IV bertanggungjawab pada Kegiatan, eselon III bertanggungjawab pada Program, dan eselon II bertanggungjawab pada Kebijakan.

Dalam menyusun RENJA, ada beberapa hal yang mendapat perhatian seperti : (a) Tugas pokok dan Fungsi, (b) Capaian kinerja tahun sebelumnya, (c) Permasalahan yang diprediksi muncul pada tahun mendatang dan (d) Indikasi alokasi dana yang diperkirakan pada tahun-tahun mendatang.

## 1.2 Landasan Hukum

Dalam masa satu tahun, sebagai salah satu pejabat eselon III di bawah Sekretaris Daerah Kabupaten Jembrana diwajibkan menyusun Rencana Kerja (Renja) sebagai alat ukur keberhasilan pencapaian sasaran dan kegiatan. Rencana Kerja Tahunan tersebut berfungsi sebagai perencanaan operasional yang menjadi dasar pengajuan anggaran berbasis kinerja.

Sebagaimana disebutkan di atas, dengan terbitnya Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 dan Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jembrana, maka pelaksanaan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jembrana merupakan penjabaran tahunan dari Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jembrana. Rencana Kerja (RENJA) disusun berdasarkan beberapa landasan sebagai berikut :

- Landasan Idiil, yaitu Pancasila,
- Landasan Konstitusional, yaitu UUD 1945,
- Landasan Operasional :
  1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);



4. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);  
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
7. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 5);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jembrana Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 1);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Semesta Berencana Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2024 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 7);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 8 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Semesta Berencana Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2025 Nomor 8, Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 8);
12. Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKPD) Semesta Berencana Tahun 2026
13. Keputusan Bupati Jembrana Nomor 502 Tahun 2024 tentang Pembentukan Tim Penyusunan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2026 dan Perubahan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2025;



### 1.3 Maksud dan Tujuan

#### 1.3.1. Maksud Penyusunan Renja BPBD Kabupaten Jembrana

Sebagaimana diuraikan pada latar belakang, bahwa Renja merupakan Rencana kurun waktu satu tahun sebagai penjabaran RPJMD Kabupaten Jembrana Tahun 2025-2029, maka untuk tahun 2026 ditetapkan Renja dengan maksud untuk memberikan arah kebijakan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang dijabarkan oleh masing-masing bagian di bawahnya, yang merupakan penjabaran lebih lanjut sebagaimana Visi dan Misi Bupati sehingga setiap *stakeholders* dan komponen masyarakat dapat berpartisipasi sejak perencanaan, pelaksanaan maupun kontrol sosial guna mewujudkan pembangunan Kabupaten Jembrana yang berdaya guna dan berhasil guna.

Secara lebih spesifik, maksud disusun Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Jembrana, antara lain :

1. Sebagai acuan bagi seluruh jajaran pegawai BPBD dalam menentukan prioritas program dan kegiatan.
2. Sebagai tolak ukur untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan.
3. Memberikan gambaran tentang kondisi umum organisasi dalam kaitannya dengan tugas pokok dan fungsi organisasi sekaligus memberikan gambaran kondisi yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan visi dan misi organisasi.

#### 1.3.2. Tujuan Penyusunan Renja BPBD Kabupaten Jembrana

Tujuan Penyusunan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2026 merumuskan dan menetapkan visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan untuk jangka waktu satu tahun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Jembrana dalam rangka membangun daerah dan sinkronisasi serta sinergitas BPBD sebagai upaya mewujudkan BPBD yang efisien, efektif dan profesional guna mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Jembrana Tahun 2025-2029.

Secara spesifik tujuan disusun Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Jembrana, antara lain :

1. Untuk merumuskan program, dan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan tugas dan fungsi BPBD Kabupaten Jembrana
2. Mewujudkan sinergitas antara perencanaan dan penganggaran dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur.



3. Untuk memudahkan seluruh jajaran aparatur BPBD dalam memahami dan menilai arah kebijakan dan program serta kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu 1 (satu) tahun.
4. Memberikan pedoman alat pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah pada rentang 1 (satu) tahun.

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan Rencana Kerja (Renja) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Jembrana Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

### **BAB I P E N D A H U L U A N**

#### **1.1. Latar Belakang**

Latar Belakang menguraikan secara ringkas Pengertian Renja OPD, Fungsi dan Tujuan Renja OPD dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, Proses penyusunan Renja OPD, Keterkaitan Renja OPD dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra Kabupaten/Kota,

#### **1.2. Landasan Hukum**

Landasan Hukum memuat penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang Susunan Perangkat Daerah, kewenangan OPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran OPD.

#### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Maksud dan Tujuan Penyusunan Renja berisi tentang penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja OPD.

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

Sistematika Renja memuat tentang; pokok bahasan dalam penulisan Renja OPD, serta susunan garis besar isi dokumen.



## BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN LALU

### 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun 2024) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun 2025), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya.

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah dan/atau realisasi APBD untuk Perangkat Daerah yang bersangkutan.

Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini, antara lain:

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah; dan
6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Tabel yang perlu disajikan adalah Tabel T-C.29 yang disesuaikan dengan Perangkat Daerah masing-masing.

### 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008. Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan. Jika Perangkat Daerah yang bersangkutan

belum mempunyai tolok ukur dan indikator kinerja yang akan diuji, maka setiap Perangkat Daerah perlu terlebih dahulu menjelaskan apa dan bagaimana cara menentukan tolok ukur kinerja dan indikator kinerja pelayanan masing-masing sesuai tugas pokok dan fungsi, serta norma dan standar pelayanan Perangkat Daerah yang bersangkutan. Pada pembahasan sub bab ini perlu disajikan tabel analisis pencapaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah, yang disesuaikan menurut Perangkat Daerah masing-masing dengan format Tabel T-C.30.

### 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berisikan Uraian mengenai :

1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah; Khusus provinsi, uraikan mengenai koordinasi dan sinergi program antara Perangkat Daerah provinsi dengan Perangkat Daerah kabupaten/kota serta dengan kementerian dan lembaga di tingkat pusat dalam rangka pencapaian kinerja pembangunan;
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional.
4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah; dan
5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

### 2.4 *Review* Terhadap Rancangan Awal RKPD

Berisikan uraian mengenai :

1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;
3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya: terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarannya berbeda; dan
4. Lampirkan tabel T-C.31



## 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah Provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota (bila sudah dilakukan).

Deskripsi yang perlu disajikan dalam subbab ini, antara lain:

1. Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/ kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh;
2. Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah;
3. Sajikan Tabel T-C.32.



### BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

#### 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

#### 3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

#### 3.3 Program dan Kegiatan

Berisikan penjelasan mengenai:

a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.

Misal :

- a) Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah
- b) Pencapaian SDGs
- c) Pengentasan Kemiskinan
- d) Pencapaian NSPK dan SPM
- e) Pendayagunaan Daerah terisolir
- f) Pemberdayaan potensi ekonomi daerah
- g) Dsb

b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain meliputi:

- Jumlah program dan jumlah kegiatan.
- Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan (apa saja yang tersebar ke berbagai kawasan dan apa saja yang terfokus pada kawasan atau kelompok masyarakat tertentu).
- Total kebutuhan dana/ pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya.

c. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

d. Tabel rencana program dan kegiatan berdasarkan hasil pengerjaan Tabel T-C.33.

### BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

### BAB V. PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa:



- a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.
- b. Kaidah-kaidah pelaksanaan.
- c. Rencana tindak lanjut.

Pada bagian lembar terakhir dicantumkan tempat dan tanggal dokumen, nama Perangkat Daerah dan nama dan tanda tangan kepala Perangkat Daerah, serta cap pemerintah daerah yang bersangkutan.



**BAB II**  
**EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BADAN PENANGGULNGAN BENCANA**  
**DAERAH KABUPATEN JEMBRANA**  
**(TAHUN LALU)**

**2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu (Tahun 2024) dan Capaian Renstra Perangkat Daerah**

Untuk mengetahui pelaksanaan rencana kerja (renja) tahun 2024, maka dilakukan pengukuran dan evaluasi kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jembrana. Pada tahun 2024 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jembrana melaksanakan 2 program, 8 kegiatan dan 20 sub kegiatan. Anggaran belanja mengacu pada APBD Perubahan tahun 2024 sebesar Rp. 3.966.200.571,- dari jumlah anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp. 3.892.552.540,- atau 98,14%.

**Realisasi program/ kegiatan/sub kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan**

Pada tahun 2024 terdapat 8 (delapan) sub kegiatan yang tingkat realisasi kinerjanya dibawah 100%, yakni :

- a. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi Kinerja SKPD (62.31%) dengan penyerapan anggaran sebesar Rp. 200.000,00
- b. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (98.58%) dengan penyerapan anggaran sebesar Rp. 2.398.005.661,00
- c. Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (89.68 %) dengan penyerapan anggaran sebesar Rp. 426.000,00
- d. Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya (99,00%) dengan penyerapan anggaran Rp. 146.025.000,00
- e. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (84.80%) dengan penyerapan anggaran Rp. 1.015.000,00
- f. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor (90,46%) dengan penyerapan anggaran Rp. 30.746.400,00
- g. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (97,84%) dengan penyerapan anggaran Rp. 1.553.650,00
- h. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (76,00%) dengan penyerapan anggaran Rp. 42.445.742,00
- i. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (99.45%) dengan penyerapan anggaran Rp. 36.841.200,00



- j. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas/ Kendaraan Dinas Jabatan (97,92%) dengan penyerapan anggaran Rp. 34.204.904,00
  - k. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (95,87%) dengan penyerapan anggaran Rp. 147.385.283,00
  - l. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (98,88%) dengan penyerapan anggaran Rp. 15.870.000,00
  - m. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (90,00%) dengan penyerapan anggaran Rp. 900.000,00
  - n. Sub Kegiatan Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota (68,97%) dengan penyerapan anggaran Rp. 18.198.200,00
  - o. Sub Kegiatan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) (99,53%) dengan penyerapan anggaran Rp. 787.664.000,00
  - p. Sub Kegiatan Pengendalian Operasi dan Penyediaan Saranan Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota (99,46%) dengan penyerapan anggaran sebesar Rp. 78.601.500,00
- 1. Realisasi Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan**
    - a. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (100%) dengan penyerapan anggaran sebesar Rp. 500.000,00
    - b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (100%) dengan penyerapan anggaran sebesar Rp. 1.370.000,00
    - c. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (100%) dengan penyerapan anggaran Rp. 37.156.500,00
  - 2. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan**
    1. Nihil
  - 3. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/ kegiatan**
    - a. Adanya silpa pada belanja dikarenakan hampir semua belanja melakukan penawaran harga di sistem e-purchasing sehingga terdapat silpa pada belanja.
    - b. Anggaran difocusing
  - 4. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah**

Implementasi yang timbul dari tidak tercapainya target kinerja program/kegiatan terhadap target capaian program Renstra BPBD selanjutnya adalah bahwa dalam perencanaan target berikutnya, harus melihat hasil evaluasi kinerja pelaksanaan renja tahun sebelumnya. Bila pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu mempunyai kinerja kurang baik, maka berpeluang untuk menetapkan target kinerja yang diturunkan menjadi lebih rendah atau sebanding dengan tahun sebelumnya.

**5. Kebijakan/ tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut**

Secara umum dalam upaya pencapaian sasaran, ditetapkan strategi sebagai berikut:

- a. Perencanaan yang benar, akurat, dan terukur dalam penetapan target kinerja hasil atau keluaran.
- b. Untuk tahun anggaran berikutnya, dalam perencanaan untuk penentuan besaran anggaran harus disesuaikan dengan output kegiatan yang dihasilkan sehingga sisa anggaran atau pun kurang terserapnya anggaran dapat diminimalisir.
- c. Melakukan persiapan pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan sebelum anggaran disiapkan, agar tepat waktu dan tepat sasaran sesuai perencanaan yang telah ditetapkan dalam DPA.
- d. Untuk pengesahan DPA OPD agar sesuai dan tepat waktu sehingga seluruh kegiatan dapat dilaksanakan sesuai dengan perubahan anggaran yang telah ditetapkan.

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) dan Pencapaian Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021-2026 dapat dilihat pada **Tabel T-C.29**

**Tabel T-C.29.**  
**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024**  
**Kabupaten Jembrana**

Nama Perangkat Daerah : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jembrana

Lembar : .....

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
			Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2023		Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1 05 1 05	URUSAN WAJIB KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT										
1 05 1 05 03	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA ALAM DAERAH					4,534,962,948	3,691,362,877	81.40	3,966,200,571	3,892,552,540	98.14%
1 05 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	79,4	Nilai	79,4	3,328,141,948	2,582,064,727	77.58	3,069,424,571	3,008,088,840	98.00%
1 05 01 02 01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah yang tersusun	7	Laporan	7	6,558,000	6,166,000	94.02	321,000	200,000	62.31%
1 05 01 02 01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7	Laporan	7	6,558,000	6,166,000	94.02	321,000	200,000	62.31%
1 05 01 02 02	Administrasi Keuangan	Jumlah Dokumen Administrasi Akuntansi, penatausahaan dan Pelaporan Keuangan Perangkat Daerah yang tersusun	6	Dokumen	6	2,590,491,048	1,903,278,624	73.47	2,433,142,721	2,398,431,661	98.57%
1 05 01 02 02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang menerima Gaji dan Tunjangan serta Tambahan Penghasilan PNS	14	Orang	14	2,580,301,048	1,894,732,624	73.43	2,432,667,721	2,398,005,661	98.58%

1						2	3	4		5	6	7	8	9	10	11
1	05	01	02	01	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	6	Dokumen	6	10,190,000	8,546,000	83.87	475,000	426,000	89.68%
1	05	01	02	05		<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang diadakan</b>	<b>59</b>	<b>Paket</b>	<b>56</b>	<b>35,400,000</b>	<b>34,810,000</b>	<b>98.33</b>	<b>147,500,000</b>	<b>146,025,000</b>	<b>99.00%</b>
1	05	01	02	05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	59	Paket	56	35,400,000	34,810,000	98.33	147,500,000	146,025,000	99.00%
1	05	01	02	06		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Pemenuhan Kebutuhan Sarana Prasarana untuk Pelaksanaan Administrasi Perkantoran yang diadakan</b>	<b>5</b>	<b>Jenis</b>	<b>5</b>	<b>243,566,400</b>	<b>232,429,309</b>	<b>95.43</b>	<b>93,122,450</b>	<b>76,260,792</b>	<b>81.89%</b>
1	05	01	02	06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	Paket	6	9,016,000	9,016,000	100.00	1,197,000	1,015,000	84.80%
1	05	01	02	06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2	Paket	19	80,123,000	79,509,681	99.23	500,000	500,000	100.00%
1	05	01	02	06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4	Paket	3	71,455,700	61,156,000	85.59	33,989,500	30,746,400	90.46%
1	05	01	02	06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2	Paket	6	4,455,700	4,411,000	99.00	1,587,950	1,553,650	97.84%
1	05	01	02	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	Laporan	210	78,516,000	78,336,628	99.77	55,848,000	42,445,742	76.00%
1	05	01	2	07		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan</b>	<b>1</b>	<b>Unit</b>		-	-		<b>151,200,000</b>	<b>150,600,000</b>	<b>99.60%</b>
1	05	01	2	07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1	Unit		-	-		151,200,000	150,600,000	99.60%
1	05	01	02	08		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Jumlah Pemenuhan kebutuhan jasa penunjang untuk pelaksanaan administrasi perkantoran yang diadakan</b>	<b>3</b>	<b>Jenis</b>	<b>3</b>	<b>41,956,500</b>	<b>41,956,500</b>	<b>100.00</b>	<b>38,415,400</b>	<b>38,211,200</b>	<b>99.47%</b>

1						2	3	4		5	6	7	8	9	10	11
1	05	01	02	08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	244	Laporan	330	4,800,000	4,800,000	100.00	1,370,000	1,370,000	100.00%
1	05	01	02	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan	2	-	-	0.00	-	-	0.00%
1	05	01	02	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	15	Laporan	26	37,156,500	37,156,500	100.00	37,045,400	36,841,200	99.45%
1	05	01	02	09		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan</b>	<b>Jumlah Sarana prasarana perkantoran yang dipelihara dan dalam keadaan baik</b>	<b>28</b>	<b>Unit</b>	28	<b>410,170,000</b>	<b>363,424,294</b>	<b>88.60</b>	<b>205,723,000</b>	<b>198,360,187</b>	<b>96.42%</b>
1	05	01	02	09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1	Unit	1	33,306,500	33,289,681	99.95	34,930,500	34,204,904	97.92%
1	05	01	02	09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	16	Unit	16	323,363,500	282,483,613	87.36	153,742,500	147,385,283	95.87%
1	05	01	02	09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	17	Jenis	17	49,000,000	43,601,000	88.98	16,050,000	15,870,000	98.88%
1	05	01	02	09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2	Unit	2	-	-	0.00	-	-	0.00%
1	05	01	02	09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4	Unit	9	4,500,000	4,050,000	90.00	1,000,000	900,000	90.00%
1	05	01	03			<b>PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA</b>	<b>Persentase kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana</b>	<b>65</b>	<b>%</b>	65	<b>1,206,821,000</b>	<b>1,109,298,150</b>	<b>91.92</b>	<b>896,776,000</b>	<b>884,463,700</b>	<b>98.63%</b>
							<b>Indeks Resiko Bencana</b>	<b>153,5</b>	<b>Indeks</b>	151						
1	05	03	02	01		<b>Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase kawasan rawan bencana yang sudah terintegrasi sistim peringatan dini</b>	<b>65</b>	<b>%</b>	<b>65</b>	<b>969,341,000</b>	<b>944,609,150</b>	<b>97.45</b>	<b>817,750,000</b>	<b>805,862,200</b>	<b>98.55%</b>

1						2	3	4		5	6	7	8	9	10	11
1	05	03	02	01	01	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana yang Dilegalisasi	1	Dokumen	4	202,899,000	187,979,150	92.65	26,384,000	18,198,200	68.37%
1	05	03	02	01	02	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun	45	Orang	5	766,442,000	756,630,000	98.72	791,366,000	787,664,000	99.53%
1	05	03	02	02		<b>Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana</b>	<b>Tingkat kesiapsiagaan dalam pencegahan dan penanggulangan bencana (%)</b>	<b>65</b>	<b>%</b>	<b>65</b>	<b>237,480,000</b>	<b>164,689,000</b>	<b>69.35</b>	<b>79,026,000</b>	<b>78,601,500</b>	<b>99.46%</b>
1	05	03	02	02	01	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya	12	Laporan	50;15	237,480,000	164,689,000	69.35	79,026,000	78,601,500	99.46%



Dalam rangka meningkatkan pencapaian target dalam perencanaan perlu dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun sebelumnya. Dari beberapa sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra dijabarkan dalam beberapa program dan kegiatan. Pada tahun sebelumnya rencana program dan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jembrana telah disusun oleh masing-masing Kasi, guna memudahkan untuk melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan. Adapun program dan kegiatan sebagai berikut :

## 2.2 Penanggulangan Bencana

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jembrana berdasarkan Peraturan Bupati Jembrana Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Daerah, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jembrana mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang kebencanaan serta pendidikan dan pelatihan serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah dan menyelenggarakan fungsi yaitu :

1. penyusunan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
2. pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
3. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
4. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam rangka pencapaian tujuan sistem perencanaan pembangunan sebagaimana disyaratkan dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka perencanaan pembangunan harus :

1. Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan;
2. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergisitas baik antar daerah, antar ruang, antar fungsi, antar waktu, maupun antara pusat dan daerah;
3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan;
4. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat;
5. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

Sebagai upaya menciptakan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, maka peningkatan kualitas Badan



Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jember perlu dilakukan identifikasi dan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan berdasarkan tugas dan fungsi, agar layanan yang dijalankan senantiasa mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan dan aspirasi pengguna layanan.



### 2.3 Isu-isu dan Permasalahan Perangkat Daerah

1. Isu-isu :

- Peningkatan Potensi Dampak dan Risiko Bencana Geologi: Indonesia memiliki potensi bencana geologi yang tinggi karena letaknya di pertemuan tiga lempeng tektonik.
- Peningkatan Potensi Dampak dan Risiko Bencana Hidrometeorologi Akibat Perubahan Iklim: Perubahan iklim global meningkatkan intensitas bencana hidrometeorologi seperti banjir dan tanah longsor
- Peningkatan Alih Fungsi Lahan dan Percepatan Perkembangan Pusat-Pusat Pertumbuhan dan Kawasan Investasi: Alih fungsi lahan dan perkembangan kawasan investasi dapat meningkatkan risiko bencana.
- Tata Kelola Penanggulangan Bencana dan Kolaborasi Multi-Aktor Pentahelix: Pentingnya kerja sama antar pemangku kepentingan dalam penanggulangan bencana
- Pengelolaan Data dan Pemanfaatan Sistem Informasi Teknologi Kebencanaan: Pentingnya pengelolaan data dan pemanfaatan teknologi informasi dalam penanggulangan bencana.
- Monitoring, Evaluasi, dan Akuntabilitas Bidang Penanggulangan Bencana: Pentingnya monitoring, evaluasi, dan akuntabilitas dalam penanggulangan bencana.

2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jembrana :

- a. Masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap Risiko Bencana dan kurangnya pemahaman terhadap kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana .
- b. Penguatan kelembagaan di masyarakat baru sekedar penguatan kapsaitas masyarakat lokal belum pada penguatan masyarakat yang nterencana
- c. Aparatur BPBD belum seluruhnya terlatih dalam perencanaan terkait dalam manajemen penanggulangan bencana
- d. Belum terintegrasinya sistem kebencanaan
- e. Belum tersedianya aplikasi penanggulangan bencana yang dapat diakses oleh masyarakat
- f. Belum tersedianya peralatan peringatan didi.

#### **Review terhadap Rancangan Awal RKPD**

Pagu indikatif Rancangan Awal Renja BPBD Kabupaten Jembrana Tahun 2026 adalah sebesar Rp. 5.982.954.366,00 Berdasarkan hasil analisis kebutuhan dan proyeksi pendapatan, belanja dan pembiayaan pagu indikatif penetapan rancangan akhir Renja



Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp. 5.610.182.162,00 Penyesuaian pagu indikatif ini berdasarkan penyesuaian yang dilakukan oleh TAPD agar proyeksi perencanaan dapat menyesuaikan dengan kondisi ideal yang ada baik dari segi penetapan target indicator maupun anggaran yang tersedia

Perbandingan antara Rancangan Awal Renja tahun 2025 dengan hasil analisa kebutuhan yang dituangkan dalam penetapan Renja akhir tahun 2025 dapat dilihat melalui review terhadap Rancangan Awal RKPD dapat dilihat pada tabel T-C.31 berikut :

**Tabel T-C.31.**  
**Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2026**  
**Kabupaten Jembrana**

**Badan Penanggulangan Bencana Daerah**

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>URUSAN WAJIB KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT</b>				<b>5,982,954,366</b>	<b>URUSAN WAJIB KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT</b>				<b>5,610,182,162</b>
	<b>BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH</b>				<b>5,982,954,366</b>	<b>BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH</b>				<b>5,610,182,162</b>
<b>I</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>	<b>BPBD Kab. Jembrana</b>	<b>Nilai SAKIP Perangkat Daerah</b>	<b>79,4 Nilai</b>	<b>4,317,294,056</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>	<b>BPBD Kab. Jembrana</b>	<b>Nilai LKJIP Perangkat Daerah</b>	<b>79,7 Nilai</b>	<b>4,717,196,792</b>
<b>1</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>BPBD Kab. Jembrana</b>	<b>Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah yang tersusun</b>	<b>7 dokumen</b>	<b>5,420,000</b>	<b>Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>BPBD Kab. Jembrana</b>	<b>Persentase Tereleaksikannya Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah yang tersusun</b>	<b>100%</b>	<b>4,209,000</b>
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	BPBD Kab. Jembrana	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7 laporan	5,420,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	BPBD Kab. Jembrana	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	14 laporan	4,209,000
<b>2</b>	<b>Administrasi Keuangan</b>	<b>BPBD Kab. Jembrana</b>	<b>Jumlah Dokumen Administrasi Akuntansi, penatausahaan dan Pelaporan Keuangan Perangkat Daerah yang tersusun</b>	<b>6 dokumen</b>	<b>2,978,273,926</b>	<b>Administrasi Keuangan</b>	<b>BPBD Kab. Jembrana</b>	<b>Persentase Tereleaksikannya Dokumen Administrasi Akuntansi, penatausahaan dan Pelaporan Keuangan Perangkat Daerah yang tersusun</b>	<b>100%</b>	<b>3,686,307,343</b>

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	BPBD Kab. Jembrana	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	17 orang	2,965,229,926	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	BPBD Kab. Jembrana	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	34 orang/bulan	3,681,446,343
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	BPBD Kab. Jembrana	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	6 dokumen	13,044,000	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	BPBD Kab. Jembrana	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 dokumen	4,861,000
<b>3</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>BPBD Kab. Jembrana</b>	<b>Jumlah Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang diadakan</b>	<b>59 stel</b>	<b>48,300,000</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>BPBD Kab. Jembrana</b>	<b>Persentase Jumlah Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang diadakan</b>	<b>100%</b>	<b>28,399,500</b>
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	BPBD Kab. Jembrana	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	59 paket	18,300,000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	BPBD Kab. Jembrana	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	49 paket	18,399,500
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	BPBD Kab. Jembrana	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	4orang	30,000,000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	BPBD Kab. Jembrana	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	1 orang	10,000,000
<b>4</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>BPBD Kab. Jembrana</b>	<b>Jumlah Pemenuhan Kebutuhan Sarana Prasarana untuk Pelaksanaan Administrasi Perkantoran yang diadakan</b>	<b>5 jenis</b>	<b>369,181,730</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>BPBD Kab. Jembrana</b>	<b>Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana Prasarana untuk Pelaksanaan Administrasi Perkantoran yang diadakan</b>	<b>100%</b>	<b>272,506,949</b>
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	BPBD Kab. Jembrana	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	9,950,000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	BPBD Kab. Jembrana	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	6,790,000
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	BPBD Kab. Jembrana	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 paket	25,000,000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	BPBD Kab. Jembrana	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 paket	24,989,999

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	BPBD Kab. Jembrana	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 paket	84,042,530	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	BPBD Kab. Jembrana	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	7 paket	94,057,000
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	BPBD Kab. Jembrana	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 paket	6,679,200	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	BPBD Kab. Jembrana	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 paket	6,579,950
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	BPBD Kab. Jembrana	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	243,510,000	Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan konsultasi Keluar Daerah	BPBD Kab. Jembrana	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	32 laporan	140,090,000
<b>5</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>BPBD Kab. Jembrana</b>	<b>Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan</b>	<b>1 Unit</b>	<b>151,200,000</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>BPBD Kab. Jembrana</b>	<b>Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan</b>	<b>100%</b>	<b>151,200,000</b>
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	BPBD Kab. Jembrana	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	151,200,000	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	BPBD Kab. Jembrana	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	151,200,000
<b>6</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>BPBD Kab. Jembrana</b>	<b>Jumlah Pemenuhan kebutuhan jasa penunjang untuk pelaksanaan administrasi perkantoran yang diadakan</b>	<b>3 jenis</b>	<b>391,018,400</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>BPBD Kab. Jembrana</b>	<b>Persentase Pemenuhan kebutuhan jasa penunjang untuk pelaksanaan administrasi perkantoran yang diadakan</b>	<b>100%</b>	<b>169,174,000</b>
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	BPBD Kab. Jembrana	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	480 laporan	4,800,000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	BPBD Kab. Jembrana	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 laporan	4,800,000
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	BPBD Kab. Jembrana	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	-	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	BPBD Kab. Jembrana	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		-

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	BPBD Kab. Jembrana	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	386,218,400	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	BPBD Kab. Jembrana	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	164,374,000
<b>7</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan</b>	<b>BPBD Kab. Jembrana</b>	<b>Jumlah Sarana prasarana perkantoran yang dipelihara dan dalam keadaan baik</b>	<b>28 unit</b>	<b>373,900,000</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan</b>	<b>BPBD Kab. Jembrana</b>	<b>Persentase Pemenuhan Sarana prasarana perkantoran yang dipelihara dan dalam keadaan baik</b>	<b>100%</b>	<b>405,400,000</b>
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	BPBD Kab. Jembrana	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 unit	39,150,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	BPBD Kab. Jembrana	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 unit	40,500,000
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	BPBD Kab. Jembrana	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	16 unit	245,750,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	BPBD Kab. Jembrana	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	16 unit	310,400,000
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	BPBD Kab. Jembrana	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	16 unit	73,500,000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	BPBD Kab. Jembrana	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	59 unit	39,000,000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	BPBD Kab. Jembrana	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 unit	11,000,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	BPBD Kab. Jembrana	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 unit	11,000,000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	BPBD Kab. Jembrana	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	9 unit	4,500,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	BPBD Kab. Jembrana	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	9 unit	4,500,000

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
II	<b>PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA</b>	<b>BPBD Kab. Jembrana</b>	<b>Indeks Ketahanan Daerah</b> <b>Indeks Resiko Bencana</b>	<b>0,5</b> <b>153 indeks</b>	<b>1,665,660,310</b>	<b>PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA</b>	<b>BPBD Kab. Jembrana</b>	<b>Persentase Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Bencana</b>	<b>100%</b>	<b>892,985,370</b>
								<b>Persentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana</b>	<b>95,45%</b>	
								<b>Persentase Penanganan Pasca Bencana</b>	<b>80%</b>	
1	<b>Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota</b>	<b>BPBD Kab. Jembrana</b>	<b>Persentase kawasan rawan bencana yang sudah terintegrasi sistim peringatan dini</b>	<b>65%</b>	<b>357,782,700</b>	<b>Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota</b>	<b>BPBD Kab. Jembrana</b>	<b>Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana</b>	<b>100%</b>	<b>57,859,000</b>
	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	BPBD Kab. Jembrana	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun	1400 orang	357,782,700	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	BPBD Kab. Jembrana	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun	585 orang	57,859,000
2	<b>Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana</b>	<b>BPBD Kab. Jembrana</b>	<b>Tingkat kesiapsiagaan dalam pencegahan dan penanggulangan bencana (%)</b>	<b>65%</b>	<b>1,097,443,210</b>	<b>Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana</b>	<b>BPBD Kab. Jembrana</b>	<b>Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana</b>	<b>7,13%</b>	<b>706,596,370</b>

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	BPBD Kab. Jember a	Jumlah peralatan penyelamatan diri bagi individu warga negara, keluarga, maupun petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya	50 unit	50,440,620
					-	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	BPBD Kab. Jember a	Jumlah Warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsian sarana prasarana dalam pengendalian operasi penanganan darurat bencana (per jenis ancaman) kabupaten/kota	4400 orang	74,960,000
	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	BPBD Kab. Jember a	Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya	45 orang	34,974,000	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	BPBD Kab. Jember a	Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya		-
						Penyusunan Rencana Kontijensi kabupaten/kota	BPBD Kab. Jember a	Jumlah dokumen Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota (Per jenis ancaman bencana) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun		-

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	BPBD Kab. Jembrana	Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya	12 laporan	883,190,000	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	BPBD Kab. Jembrana	Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya	12 laporan	485,525,000
	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	BPBD Kab. Jembrana	Jumlah Warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	95 orang	179,279,210	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	BPBD Kab. Jembrana	Jumlah Warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	500 orang	95,670,750
	<b>Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana</b>	<b>BPBD Kab. Jembrana</b>	<b>Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana</b>	<b>100%</b>	<b>210,434,400</b>	<b>Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana</b>	<b>BPBD Kab. Jembrana</b>	<b>Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana</b>	<b>94,45%</b>	<b>128,530,000</b>
						Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	BPBD Kab. Jembrana	Jumlah laporan koordinasi respon cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	1 laporan	750,000
						Respon Cepat Darurat Bencana kabupaten/kota	BPBD Kab. Jembrana	Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang ditetapkan paling lama 1x24 jam berdasarkan hasil dokumen laporan kaji cepat	1 dokumen	1,500,000

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	BPBD Kab. Jembrana	Jumlah Korban yang berhasil ditemukan, ditolong dan dievakuasi per jenis Kejadian Bencana	350 orang	164,175,000	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	BPBD Kab. Jembrana	Jumlah Korban yang berhasil ditemukan, ditolong dan dievakuasi per jenis Kejadian Bencana	22 orang	124,410,000
	Peyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kab/Kota	BPBD Kab. Jembrana	Jumlah Korban Bencana yang mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan evakuasi korban bencana	350 orang	46,259,400	Peyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kab/Kota	BPBD Kab. Jembrana	Jumlah Korban Bencana yang mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan evakuasi korban bencana		-
						Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	BPBD Kab. Jembrana	Jumlah laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana kabupaten/kota	1 laporan	1,870,000
<b>JUMLAH</b>						<b>5,982,954,366</b>				<b>5,610,182,162</b>



#### 2.4 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi BPBD Kabupaten Jembrana sebagaimana telah diamanatkan dalam Peraturan Bupati Jembrana Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Daerah bahwa BPBD Kabupaten Jembrana mempunyai kewenangan dalam bidang kebencanaan, sehingga dengan serta merta bersentuhan langsung dengan masyarakat.

Saat penyelenggaraan Forum Perangkat Daerah dan Musyawaran Perencanaan Pembangunan tidak terdapat usulan program tetapi terdapat usulan kegiatan masyarakat yang meliputi urusan kebencanaan yaitu kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana sehingga terdapat data yang disajikan dalam tabel T-C.32. Adapun arahan pimpinan rapat saat Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tahun 2025 antara lain :

- Rancangan Renja Tahun 2026 agar mengakomodir Visi Misi Bupati dan Wakil Bupati 8 Program Prioritas agar dilaksanakan melalui program/kegiatan
- Sub Kegiatan Diklat/Bimtek yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi OPD agar dianggarkan pada masing-masing OPD
- Pelaksanaan kegiatan agar mendukung pencapaian target SPM
- Rancangan Renja Tahun 2026 agar mengakomodir pokok-pokok Pikiran Dewan
- Rancangan Renja Tahun 2026 agar mengakomodir hasil Musrenbang Kecamatan
- Indikator sub kegiatan agar menyesuaikan dengan Kepmendagri 900-1.15.5-3406 Tahun 2024.
- Kode program, kegiatan dan sub kegiatan agar dicermati dan dievaluasi kembali.

### BAB III

## TUJUAN DAN SASARAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN JEMBRANA

### 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Kebijakan-kebijakan nasional ditetapkan dalam kerangka pembangunannya, secara operasional bidang kebencanaan yaitu dari paradigma tanggap darurat ke paradigma pengurangan resiko bencana . Kebijakan umum bertujuan menggambarkan keterkaitan antar bidang urusan pemerintahan daerah dengan rumusan indikator kinerja sasaran, dan berfungsi sebagai acuan dalam menyusun program pembangunan daerah jangka menengah. Program yang disusun untuk mewujudkan sasaran strategis, dengan memakai sumberdaya, sesuai pula dengan ketentuan serta berdasar strategi maupun arah kebijakan yang telah ditetapkan.

Mengacu kepada Undang-Undang (UU) Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Peraturan Pernerintah (PP) Nornor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional, pemerintah perlu menyusun dokumen perencanaan tahunan melalui Rencana Kerja Pemerintah (RKP), sebagai penjabaran dari dokumen perencanaan jangka menengah (RPJMN). Berdasarkan prosesnya, penyusunan RKP dilaksanakan dengan pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, atas-bawah (top-down), dan bawah-atas (bottom-up). Lebih lanjut, berdasarkan substansinya penyusunan RKP dilaksanakan dengan money follow program melalui pendekatan Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial (THIS).

Tema RKP Tahun 2026 yang diangkat pemerintah adalah “Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan” Dalam mendukung pelaksanaan tema tersebut ditetapkan 8 arah kebijakan RKP Tahun 2026 yang terdiri dari :

1. Pengurangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrim
2. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan
3. Revitalisasi industry dan penguatan riset terapan
4. Penguatan daya saing
5. Pembangunan rendah karbon dan transisi energi
6. Percepatan pembanguan infrastruktur dasar dan konektivitas
7. Percepatan pembangunan Ibu Kota Negar (IKN)

Untuk menjaga kesinambungan pelaksanaan RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) 2020-2024, RKP tahun 2024 tetap melanjutkan pelaksanaan tujuh Prioritas Nasional (PN), yakni (1) Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan; (2) Mengembangkan Wilayah untuk



Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan; (3) Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing; (4) Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan; (5) Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar; (6) Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim; serta (7) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagai salah satu institusi pemerintah di daerah perlu merubah dan mengembangkan pengelolaan sistem kebencanaan secara adil dan merata agar dapat bersaing dengan daerah lain serta memanfaatkan peluang, kekuatan, merubah kelemahan dan ancaman menjadi peluang. Merujuk pada Prioritas Nasional Tahun 2024, Badan Penanggulangan Bencana Daerah terkait dengan PN ke-7 yaitu memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan dan keamanan (polhukhankam) dan transformasi pelayanan public, tepatnya pada aspek Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola dengan indikator kedua yaitu Persentase Instansi Pemerintah dengan Indeks Sistem Merit Kategori  $\geq$  Baik.

### 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi sehingga rumusannya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Untuk itu tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih dari masing-masing misi. Meneg PAN menyatakan: “Tujuan adalah hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Tujuan organisasi harus konsisten dengan tugas dan fungsinya. Secara kolektif, tujuan organisasi menggambarkan arah strategis organisasi dan perbaikan-perbaikan yang ingin diciptakan sesuai dengan tugas dan fungsi organisasi “ (Meneg.PAN, 2008:20). Penetapan tujuan didasarkan kepada faktor-faktor kunci keberhasilan yang ditetapkan setelah penetapan Visi dan Misi.

Sehubungan dengan penyusunan Renstra Badan penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2025-2029 yang dilakukan simultan dengan penyusunan Rencana Kerja Tahun 2026, dimana terdapat penyesuaian tujuan, sasaran maupun indikator perangkat daerah, sehingga tujuan dan sasaran yang tercantum dalam Rencana kerja Kepala Pelaksana Badan penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2026 menyesuaikan dengan Renstra dimaksud.



**TABEL 3.2.1**  
**TUJUAN BPBD KABUPATEN JEMBRANA**

No	Tujuan	Indikator Kinerja	Satuan	Target (Th ke-5)
1	Meningkatnya Resiliensi daerah Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	Indeks Ketahanan Daerah	Indeks	0.62

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh instansi pemerintah dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulanan atau bulanan. Sasaran diusahakan dalam bentuk kuantitatif sehingga dapat diukur. Sasaran harus menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan” Meneg PAN, 2008:21-22). Sementara itu menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, sasaran kinerja merupakan hasil yang diharapkan dari suatu kegiatan atau keluaran yang diharapkan dari suatu sub kegiatan yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.

Dari dua pengertian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa sasaran kegiatan adalah hasil yang ingin dicapai dalam jangka waktu bulanan, triwulanan paling lama satu tahun. Adapun Tujuan dan Sasaran yang ingin dicapai dalam Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jember Tahun 2024 disajikan dalam bentuk Tabel, sebagai berikut:

**TABEL 3.2.2**  
**SASARAN BPBD KABUPATEN JEMBRANA**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Tahun 2026
1	Meningkatnya Resiliensi daerah Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim		Indeks Ketahanan Daerah	0.65
		Terwujudnya Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Persentase Kebijakan Daerah dalam Penanggulangan Bencana	52,63%
		Meningkatnya Mitigasi Bencana melalui pemberdayaan masyarakat dan aparatur serta penerapan Infrastruktur	Persentase Desa/Kelurahan Tangguh Bencana	33,33%



		Aman Bencana		
		Meningkatnya Kualitas Penanganan kedaruratan bencana	Rata-Rata Waktu respons tim penanggulangan bencana	15 Menit
		Meningkatnya Efektivitas tata kelola internal dalam mendukung pelayanan penanggulangan bencana	Nilai LKjIp Perangkat Daerah	79,60

### 3.3 Program dan Kegiatan

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai setiap sasaran strategisnya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan ke dalam program dan kegiatan yang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan memperhatikan dan mempertimbangkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 dan Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2016, tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jembrana dijabarkan dalam Program yang terdiri dari beberapa kegiatan yang mengacu pada :

1. Kerangka regulasi yang bertujuan untuk memfasilitasi, mendorong, maupun mengatur dan menggerakkan Sumber Daya Aparatur untuk berperan dalam pembangunan
2. Kerangka anggaran yang bertujuan untuk menyediakan barang dan jasa yang diperlukan dalam melaksanakan program dan kegiatan

Penyusunan program/ kegiatan tahun 2024 mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang selanjutnya disusul dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah terdapat 2 program dan 9 kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan fungsi penunjang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan. Rencana program dan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jembrana dalam tahun 2024 adalah sebagai berikut :

a) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program ini dilaksanakan melalui 7 (tujuh) kegiatan sebagai berikut:

1. Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Kegiatan Administrasi Keuangan
3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
5. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah



b) Program Penanggulangan Bencana

Program ini dilaksanakan melalui 3 (tiga) kegiatan sebagai berikut:

1. Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota
2. Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
3. Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana

Untuk lebih rincinya tabel rencana program dan kegiatan dapat dilihat pada **Tabel T-C.32**

**Tabel T-C.32.**  
**Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan**  
**Tahun 2026**  
**Kabupaten Jembrana**  
**Nama Perangkat Daerah : Badan Penanggulangan Bencana Daerah**

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>		<b>Nilai LKJIP Perangkat Daerah</b>	<b>79,7 Nilai</b>	
	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Kab. Jembrana</b>	<b>Persentase Tereleaksikannya Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah yang tersusun</b>	<b>100%</b>	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Jembrana	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	14 laporan	
	<b>Administrasi Keuangan</b>	<b>Kab. Jembrana</b>	<b>Persentase Tereleaksikannya Dokumen Administrasi Akuntansi, penatausahaan dan Pelaporan Keuangan Perangkat Daerah yang tersusun</b>	<b>100%</b>	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Jembrana	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	30 orang	
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kab. Jembrana	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 dokumen	
	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>BPBD Kab. Jembrana</b>	<b>Jumlah Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang diadakan</b>	<b>100%</b>	
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	BPBD Kab. Jembrana	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	49 paket	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	BPBD Kab. Jembrana	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	1 orang	
	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Kab. Jembrana</b>	<b>Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana Prasarana untuk Pelaksanaan Administrasi Perkantoran yang diadakan</b>	<b>100%</b>	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Jembrana	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	BPBD Kab. Jembrana	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 paket	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Jembrana	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	7 paket	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Jembrana	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 paket	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Jembrana	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	32 laporan	
	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Kab. Jembrana</b>	<b>Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan</b>	<b>100%</b>	
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Jembrana	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	

	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Kab. Jembrana</b>	<b>Persentase Pemenuhan kebutuhan jasa penunjang untuk pelaksanaan administrasi perkantoran yang diadakan</b>	<b>100%</b>	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Jembrana	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 laporan	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Jembrana	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Jembrana	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	
	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan</b>	<b>Kab. Jembrana</b>	<b>Persentase Pemenuhan Sarana prasarana perkantoran yang dipelihara dan dalam keadaan baik</b>	<b>100%</b>	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Jembrana	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 unit	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Jembrana	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	16 unit	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Jembrana	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	59 unit	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Jembrana	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 unit	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Jembrana	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	9 unit	
	<b>PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA</b>	<b>Kab. Jembrana</b>	<b>Persentase Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Bencana</b>	<b>100%</b>	
			<b>Persentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana</b>	<b>95,45%</b>	
			<b>Persentase Penanganan Pasca Bencana</b>	<b>80%</b>	
	<b>Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota</b>	<b>Kab. Jembrana</b>	<b>Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana</b>	<b>100%</b>	
	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Kab. Jembrana	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun	3500 orang	
	<b>Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana</b>	<b>Kab. Jembrana</b>	<b>Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana</b>	<b>7,13%</b>	

	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	Kab. Jembrana	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya	50 unit	
	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	Kab. Jembrana	Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsian sarana prasarana dalam pengendalian operasi penanganan darurat bencana (per jenis ancaman) kabupaten/kota	4400 orang	
	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Jembrana	Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya		
	Penyusunan Rencana Kontijensi kabupaten/kota	Kab. Jembrana	Jumlah dokumen Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota (Per jenis ancaman bencana) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun		
	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Jembrana	Jumlah Warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	12 Laporan	
	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Jembrana	Jumlah Warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	500 Orang/ kawasan	
	<b>Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana</b>	<b>Kab. Jembrana</b>	<b>Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana</b>	<b>100%</b>	
	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	Kab. Jembrana	Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas	1 Laporan	
	Respon Cepat Darurat Bencana kabupaten/kota	Kab. Jembrana	Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Daerah Bencana dan SKPDB yang ditetapkan paling 1x24 jam berdasarkan hasil dokumen laporan kaji cepat	1 dokumen	
	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Jembrana	Jumlah Korban yang berhasil ditemukan, ditolong dan dievakuasi per jenis Kejadian Bencana	35 Orang	
	Peyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kab/Kota	Kab. Jembrana	Jumlah Korban Bencana yang mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan evakuasi korban bencana		
	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Kab. Jembrana	Jumlah laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kabupaten/kota	1 laporan	



#### BAB IV

### RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Program dan kegiatan yang direncanakan telah dirumuskan melalui berbagai macam faktor yang menjadi pertimbangan. Mengacu pada Visi Misi Kabupaten Jembrana, program dan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jembrana lebih menitikberatkan pada 3 (tiga) hal sesuai dengan isu-isu strategi yang dihadapi BPBD yaitu Meningkatkan upaya pencegahan, penanganan dan penyelamatan atau evakuasi korban bencana.

Jumlah keseluruhan rencana program dan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jembrana pada tahun 2026 berjumlah 2 (dua) program dengan jumlah kegiatan sebanyak 10 (sepuluh) kegiatan. Untuk lebih jelasnya, rekapitulasi pagu indikator program/ kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jembrana ditunjukkan pada tabel di bawah ini.

**Tabel 4.1**  
**Rekapitulasi Pagu Indikatif Program/ Kegiatan Tahun 2026**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)		
			Target Capain Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6
	<b>Badan Penanggulangan Bencana Daerah</b>			5.610.182.162	
<b>01.05.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>	<b>Nilai SAKIP Perangkat Daerah</b>	<b>79,7 Nilai</b>	<b>4.717.196.792</b>	
<b>1.05.01.02.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Terelesaiannya Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah yang tersusun</b>	<b>100%</b>	<b>4.209.000</b>	
1.05.01.02.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	14 laporan	4.209.000	
<b>1.05.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Terelesaiannya Dokumen Administrasi Akuntansi, penatausahaan dan Pelaporan Keuangan Perangkat Daerah yang tersusun</b>	<b>100%</b>	<b>3.686.307.343</b>	



1.05.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	30 orang/bulan	3.681.446.343	
1.05.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 dokumen	4.861.000	
<b>1.05.01.2.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang diadakan</b>	<b>100%</b>	<b>28.393.500</b>	
1.05.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	49 paket	18.399.500	
1.05.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	1 orang	10.000.000	
<b>1.05.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana Prasarana untuk Pelaksanaan Administrasi Perkantoran yang diadakan</b>	<b>100%</b>	<b>272.506.949</b>	
1.05.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 paket	6.790.000	
1.05.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 paket	24.989.999	
1.05.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	7 paket	94.057.000	
1.05.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 paket	6.579.950	
1.05.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	32 laporan	140.090.000	
<b>1.05.01.2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Pengadaan barang milik daerah yang diadakan</b>	<b>100%</b>	<b>151.200.000</b>	
1.05.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	151.200.000	
<b>1.05.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang untuk pelaksanaan administrasi perkantoraan yang diadakan (jenis)</b>	<b>100%</b>	<b>169.174.000</b>	
1.05.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 laporan	4.800.000	
1.05.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	164.374.000	
<b>1.05.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Pemenuhan sarana prasarana perkantoran yang dipelihara dan dalam keadaan baik (jenis)</b>	<b>100%</b>	<b>405.400.000</b>	



1.05.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 unit	40.500.000	
1.05.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	16 unit	310.400.000	
1.05.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	59 unit	39.000.000	
1.05.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 unit	11.000.000	
1.05.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	9 unit	4.500.000	
<b>1.05.03</b>	<b>PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA</b>	<b>Persentase Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Bencana</b>	<b>100%</b>	<b>892.985.370</b>	
		<b>Persentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana</b>	<b>95,45%</b>		
		<b>Persentase Penanganan Pasca Bencana</b>	<b>80%</b>		
<b>1.05.03.2.01</b>	<b>Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana</b>	<b>100 %</b>	<b>57.859.000</b>	
1.05.03.2.01.02	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun	3500 orang	57.859.000	
<b>1.05.03.2.02</b>	<b>Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana</b>	<b>Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana</b>	<b>7,13 %</b>	<b>706.596.370</b>	
1.05.03.2.02.0015	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri Bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya	50 unit	50.440.620	
1.05.03.2.02.0018	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan	4400 orang	74.960.000	



		keberfungsian sarana prasarana dalam pengendalian operasi penanganan darurat bencana (per jenis ancaman) kabupaten/kota			
1.05.03.2.02.0021	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya			-
1.05.03.2.02.0022	Penyusunan Rencana Kontijensi kabupaten/kota	Jumlah dokumen Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota (Per jenis ancaman bencana) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun			-
1.05.03.2.02.0028	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	500 orang/kawasan	95.670.750	
1.05.03.2.02.0026	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya	12 laporan	485.525.000	
<b>1.05.03.2.03</b>	<b>Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana</b>	Persentase Warga negara yang memperoleh layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	100%	<b>128.530.000</b>	
1.05.03.2.03.0001	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit Wabah/Prioritas	1 laporan	750.000	
1.05.03.2.03.0002	Respon Cepat Darurat Bencana kabupaten/kota	Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang ditetapkan paling lama 1x24 jam berdasarkan hasil dokumen Laporan Kaji Cepat	1 dokumen	1.500.000	
1.05.03.2.03.0003	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban yang berhasil ditemukan, ditolong dan dievakuasi per jenis Kejadian Bencana	22 orang	124.410.000	
1.05.03.2.03.0009	Peyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kab/Kota	Jumlah Korban Bencana yang mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan evakuasi korban bencana	-	-	
1.05.03.2.03.0012	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Jumlah laporan pelaksanaan aktivitas sistem komando penanganan darurat bencana kabupaten/kota	1 laporan	1.870.000	

Untuk menjaga efektivitas pelaksanaan program, maka monitoring dan evaluasi harus menjadi kegiatan yang tak terpisahkan dari keseluruhan proses pembangunan dan



dilaksanakan pada setiap tahapan, agar diperoleh hasil yang maksimal, serta sebagai umpan balik bagi perencanaan pembangunan tahap berikutnya.



## BAB V PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jembrana disusun berdasarkan Perencanaan Strategis yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Pelaksanaan Program dan Kegiatan tersebut tidak lepas dari pada Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jembrana sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 57 tahun 2021. Dalam Renja Tahun 2025 tidak semua program dan kegiatan yang tertuang dalam Rencana Strategis dapat ditampung karena keterbatasan sumber dana yang ada sehingga memprioritaskan kebutuhan yang mendesak untuk dilaksanakan.

Kaidah – kaidah pelaksanaan program dan Kegiatan berdasarkan rencana kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jembrana dan mengacu pada DPA dengan alokasi anggaran sesuai dengan pagu APBD. Rencana tindak lanjut Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jembrana pada tahun 2026 mendatang akan menetapkan 2 program dan 10 kegiatan yang dilaksanakan sesuai APBD tahun 2026.

Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jembrana tahun 2026 merupakan dokumen rencana kerja yang berfungsi sebagai pedoman perencanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan 1 (satu) tahun kedepan.

Demikian rencana kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jembrana tahun 2026 disusun, diharapkan mampu melaksanakan tugas – tugas sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Meskipun Rencana Kerja ini telah disusun dengan usaha maksimal dengan mempertimbangkan kebutuhan yang bersifat strategis, dan apabila masih banyak menemui permasalahan dan hambatan, kami sangat memerlukan masukan berupa saran, pendapat serta kritik yang membangun sebagai bahan untuk melakukan perbaikan-perbaikan dalam penyempurnaan penyusunan Rencana Kerja tahun berikutnya.

Dengan kesungguhan dalam penyusunan Rencana Kerja ini, nantinya merupakan komitmen dari seluruh jajaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang mendukung untuk mewujudkannya.

Negara, 30 Juli 2025

Kepala Pelaksana  
Badan Penanggulangan Bencana Daerah  
Kabupaten Jembrana,



**Irena Agus Artana Putra, S.Sos**

Pembina TK. I  
NIP. 19700807 199201 1 003



- KETIGA : Daftar usulan program, kegiatan dan sub kegiatan Lintas Perangkat Daerah dan lintas wilayah sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN III berita acara ini;
- KEEMPAT : Berita acara ini beserta lampirannya (LAMPIRAN I, II, III) merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari berita acara hasil kesepakatan forum Lintas Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Jembrana ini; dan
- KELIMA : Berita acara ini beserta lampirannya dijadikan sebagai bahan Penyempurnaan rancangan RKPD Kabupaten Jembrana Tahun 2026.

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan untuk digunakan sebagaimana mestinya

Jembrana, 6 Maret 2025

Pimpinan Sidang

Kepala Pelaksana BPBD

Kabupaten Jembrana,



**(I Putu Agus Artana Putra, S.Sos)**

Pembina TK. I

NIP. 19700807 199201 1 003

Menyetujui,  
 Wakil Peserta Forum Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten  
 Jembrana.

No	Nama	Lembaga/ Instansi	Alamat	Tanda Tangan
1.	I PT Agus Ariana Putra.Sos	BABD	Jembrana	
2.	IBSE. Mibawa Mamban	BABD	Jembrana	
3.	IDA MADU Putra	Kodim 1607	Dauhwaru	
4.	Gusti Ayu Kt Widari	Bappeda	Jembrana	
5.	Azi Bharunayuti	POKRAO	Jembrana	
6.	Made Sumarta	Camat Negara	Negara	
7.	IKM PIRAWA	OPAUD	Negara	
8.	Gi Swandari	Bappeda	Negara	
9.	I. Hym Supartha .WD	Bosimob	Yon C Gilimanuk	
10.	W. DHARMA	Relawan BABD	Yon Kelep	
11.	MASRAM	kec. Mandaya	Mandaya	
12.	Charly Kalsaly	kec. Jln	Jln.	
13.	Arte Wyaya	Kec. Mandaya	Mandaya	
14.	Made Dody Tisno	DLH	Negara	
15.	Cela Audlyka Selwaly	Dusela	Negara	
16.	WAN SWEYS	Inspektur	Negara	
17.	Devo Pt Hendri	BASARNAS	Banyuwiru	
18.	I Made Rano, ST	BK. PU	Negara	
19.	Pcha Ruan	BK. PU	Negara	
20.	Ketut + Jnabun	Bmles	Negara	
21.	Febry H	kesbangud	Negara	
22.	Dwaja Putra	Basarnas	Negara	
23.	Agus Wawan	banpa		
24.	led pt Kaseliana	Bimba	Cher	
25.	AGUNG DHARMA Y	BRIMOB	GILIMANUK	
26.	made sutarna	Kodim		
27.	GEK GDE FIKU	FORA	Jembrana	
28.	I GUSTI PT BAGUS S	PARA	Jembrana	
29.	Bahri Luprianto	D. PUPUKOP	Negara	
30.	MD Septa Budharta	BABD	Jembrana	
31.	Ammu.	Pancos	Jembrana	

32.	Myeman Lurah	BPBD	Jembrana	✓
33.	CANTANO P	BRIMOB	Cantana	Agus
34.				
35.				

Jembrana, 6 Maret 2025

Pimpinan Sidang

Kepala Pelaksana BPBD

Kabupaten Jembrana,



(Agus Artana Putra, S.Sos)

Pembina TK. I

NIP. 19700807 199201 1 003

LAMPIRAN I : BERITA ACARA HASIL KESEPAKATAN FORUM PERANGKAT  
 DAERAH BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN  
 JEMBRANA TAHUN 2025.

Nomor : 360 / 717 / BPBD-SET / 2025

Tanggal : 6 Maret 2025

**DAFTAR HADIR PESERTA FORUM PERANGKAT DAERAH/LINTAS  
 PERANGKAT DAERAH BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**

Kabupaten : Jembrana

Tanggal : 6 Maret 2025

Tempat : Ruang Rapat Inspektorat Kabupaten Jembrana

No	Nama	Lembaga/ Instansi	Alamat	Tanda Tangan
1.	IPT Agus Artana Putra.s.sol.	BPBD	Jembrana	[Signature]
2.	IBk. Wibawa Manuaba.op.	BPBD-	Jembrana	[Signature]
3.	IDA MADE PUTRA	Kodum 1607	Duh Wary	[Signature]
4.	Gusti Ayu Lit Widari	Bappeda	Jembrana	[Signature]
5.	Adi Dharmayanti	BPBAD	Jembrana	[Signature]
6.	Imade Sennata	camat Negara	Negara	[Signature]
7.	Ika Prana	BPBD	Negara	[Signature]
8.	Sri Swandari	Bappeda	Negara	[Signature]
9.	I. Wm Supartha Wp	Basimob WNC	Gilimanuk	[Signature]
10.	W. DHARMA	Relawan BPBD.	Yoy Kuyip	[Signature]
11.	MASITANI	Kec Melaga	Melaga	[Signature]
12.	Charly Nabatah	Kec. Jhu	Jhu	[Signature]
13.	ARIE WIJAYA	Kec. Mendoyo	Mendoyo	[Signature]
14.	Made Dodi Tisna	DLH	Negara	[Signature]
15.	Gia Adlyka S	Dinas Sosial	Negara	[Signature]
16.	Wan Sufya	Lupulitrat	Negara	[Signature]
17.	Dewi Pt Hendri G.	BASARNAS	Bahyubiru	[Signature]
18.	Waher Per. SA	Korp	Tagan	[Signature]
19.	Rita Rina	Ukrir	Tagan	[Signature]
20.	Kelit Dinalin	Dukas	Negara	[Signature]
21.	Faby Pu	Kesbangpol	Negara	[Signature]
22.	Dwijya Putra	Basarnas	Negara	[Signature]
23.	Agus Wicary	Basarnas	Negara	[Signature]
24.	Ol Kasbana	Basarnas	Negara	[Signature]

25.	LANANG A	BRIMOB	CECIMANUR	
26.	AGUNG D. Y.	BRIMOB	CECIMANUR	
27.	Imade Riana	Badan		
28.	LOK BRK P.	POUR	JEMBRANA	
29.	I Sri PT Bku	Pada	J	
30.	Bdi Suprianto	PUPR/PLP	Negara	
31.	MD Sapta Budhara	BPBD	Jembrana.	
32.	Adana	Militer	- 0 -	
33.	Nyoman Ukhala	BPBD	Jembrana	
34.				
35.				
36.				
37.				
38.				
39.				
40.				

Jembrana, 6 Maret 2025

Kepala Pelaksana BPBD  
Kabupaten Jembrana,



**(P. Agus Artana Putra, S.Sos)**

Pembina TK. I

NIP. 19700807 199201 1 003

LAMPIRAN II : BERITA ACARA HASIL KESEPAKATAN FORUM PERANGKAT DAERAH BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2025.  
 Nomor : 360 / 717/ BPBD-SET / 2025  
 Tanggal : 6 Maret 2025

**RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN  
 PERANGKAT DAERAH  
 TAHUN 2026 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027  
 PERANGKAT DAERAH BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
 KABUPATEN JEMBRANA**

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target		Pagu Dana	
			2026	2027	2026	2027
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>	<b>Nilai SAKIP Perangkat Daerah</b>	<b>79,4</b>	<b>79,4</b>	<b>4.317.293.826</b>	<b>4.364.371.633,60</b>
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah yang tersusun	7	7	5.420.000	5.420.000
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7	7	5.420.000	5.420.000
	Administrasi Keuangan	Jumlah Dokumen Administrasi Akuntansi, penatausahaan dan Pelaporan Keuangan Perangkat Daerah yang tersusun	6	6	2.978.273.926	2.978.273.926

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14	14	2.965.229.926	2.965.229.926
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	6	6	13.044.000	13.044.000
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang diadakan	59	59	48.300.000	48.300.000
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	59	59	18.300.000	18.300.000
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	4	4	30.000.000	30.000.000
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pemenuhan Kebutuhan Sarana Prasarana untuk Pelaksanaan Administrasi Perkantoran yang diadakan	5	5	369.181.500	369.181.500
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	1	9.950.000	9.950.000
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3	3	25.000.000	25.000.000
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4	4	84.042.300	84.042.300

Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2	2	6.679.200	6.679.200
Kegiatan Rapat-Rapat Kordinasi dan konsultasi Keluar Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	12	243.510.000	243.510.000
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan	1	1	151.200.000	151.200.000
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1	1	151.200.000	151.200.000
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pemenuhan kebutuhan jasa penunjang untuk pelaksanaan administrasi perkantoran yang diadakan	2	2	391.018.400	391.018.400
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	480	480	4.800.000	4.800.000
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	12	386.218.400	386.218.400
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	Jumlah Sarana prasarana perkantoran yang dipelihara dan dalam keadaan baik	28	28	373.900.000	373.900.000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1	1	39.150.000	39.150.000

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	16	16	245.750.000	245.750.000
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	17	17	73.500.000	73.500.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2	2	11.000.000	12.100.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	9	9	4.500.000	4.950.000
<b>PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA</b>	<b>Indeks Ketahanan Daerah</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>1.665.660.310</b>	<b>1.665.660.310</b>
	<b>Indeks Risiko Bencana</b>	<b>153</b>	<b>153</b>		
Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase kawasan rawan bencana yang sudah terintegrasi sistim peringatan dini	65	65	357.782.700	357.782.700
Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan	1400	1400	357.782.700	357.782.700
Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Tingkat kesiapsiagaan dalam pencegahan dan penanggulangan bencana (%)	65	65	1.097.443.210	1.097.443.210
Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya	45	45	34.974.000	34.974.000

Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya	12	12	883.190.000	883.190.000
Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	95	95	179.279.210	179.279.210
Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	100	100	210.434.400	210.434.400
Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban yang berhasil ditemukan, ditolong dan dievakuasi per jenis Kejadian Bencana	350	350	164.175.000	164.175.000
Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kab/Kota	Jumlah Korban Bencana yang mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan evakuasi korban bencana	350	350	46.259.400	46.259.400
<b>TOTAL</b>				<b>5.982.954.366</b>	<b>5.982.954.366</b>

Jembrana, 6 Maret 2025

Kepala Pelaksana

Badan Penanggulangan Bencana

Daerah  
Kabupaten Jembrana,



Putu Agus Artana Putra, S.Sos

Pembina TK. I

NIP. 19700807 199201 1 003

LAMPIRAN III : BERITA ACARA HASIL KESEPAKATAN  
FORUM PERANGKAT DAERAH BADAN  
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2025.

Nomor : 360 / 171 / BPBD-SET / 2025

Tanggal : 6 Maret 2025

**DAFTAR USULAN KEGIATAN LINTAS PERANGKAT DAERAH DAN LINTAS  
WILAYAH PERANGKAT DAERAH BADAN PENANGGULANGAN BENCANA  
DAERAH KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2026**

No	Sub Kegiatan	Lokasi	Volume	Alasan
1	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Kabupaten Jembrana		Termasuk SPM
2	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Kabupaten Jembrana		Termasuk SPM
3	Penyusunan Rencana Kontijensi	Kabupaten Jembrana		Termasuk SPM
4	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	Kabupaten Jembrana		Termasuk SPM
5	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten Kota	Kabupaten Jembrana		Termasuk SPM
6	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Kabupaten Jembrana		Termasuk SPM

Jembrana, 6 Maret 2025

Kepala Pelaksana

Badan Penanggulangan Bencana

Daerah

Kabupaten Jembrana,



P. Putu Agus Artana Putra, S.Sos

Pembina TK. I

NIP. 19700807 199201 1 003

**PENETAPAN RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)  
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KAB. JEMBRANA  
TAHUN 2026**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)			
											NASIONAL					DAERAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		<b>BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH</b>						<b>6.270.913.384,00</b>								<b>6.329.697.442,00</b>	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						<b>6.270.913.384,00</b>								<b>6.329.697.442,00</b>	
	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT						<b>6.270.913.384,00</b>								<b>6.329.697.442,00</b>	
1.	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	<i>Nilai LKJP Perangkat Daerah</i>	-			79,70 Nilai	<b>5.377.928.014,00</b>						-	<b>5.065.185.049,00</b>		
	1.05.01.2.01	Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>Persentase terselesaikannya Dokumen Perencanaan dan Penggangan Perangkat Daerah yang tersusun</i>	-			100 %	4.209.000,00			Memperkok oh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Bidang Prioritas Inf rastruktur dan Lingkungan Berkelanjut an	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jembrana	-	1.866.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
	1.05.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD															
			<i>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>				14 Laporan	4.209.000,00	Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkok oh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Bidang Prioritas Inf rastruktur dan Lingkungan Berkelanjut an	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jembrana		1.866.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
	1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>Persentase terselesaikannya Dokumen Administrasi Akuntansi, Penatausahaan dan Pelaporan Keuangan Perangkat Daerah yang tersusun</i>	-			100 %	4.347.038.565,00			Memperkok oh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Bidang Prioritas Inf rastruktur dan Lingkungan Berkelanjut an	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jembrana	-	4.122.273.719,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
	1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN															

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>				30 Orang/bulan	4.342.177.565,00	Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi Bidang Prioritas Infrastruktur dan Lingkungan Berkelanjutan	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jembrana		4.118.073.719,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD</i>				12 Dokumen	4.861.000,00	Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi Bidang Prioritas Infrastruktur dan Lingkungan Berkelanjutan	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jembrana		4.200.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	<i>Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang Diadakan</i>	-			100 %	28.399.500,00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi Bidang Prioritas Infrastruktur dan Lingkungan Berkelanjutan	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jembrana	-	53.700.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			<i>Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan</i>				52 Paket	18.399.500,00	Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi Bidang Prioritas Infrastruktur dan Lingkungan Berkelanjutan	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jembrana		31.200.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan</i>				1 Orang	10.000.000,00	Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi Bidang Prioritas Infrastruktur dan Lingkungan Berkelanjutan	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jembrana		22.500.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana Prasarana untuk Pelaksanaan Administrasi Perkantoran yang Diadakan</i>	-			100 %	272.506.949,00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi Bidang Prioritas Infrastruktur dan Lingkungan Berkelanjutan	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jembrana	-	193.200.330,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>				1 Paket	6.790.000,00	Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi Bidang Prioritas Infrastruktur dan Lingkungan Berkelanjutan	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jembrana		3.980.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				2 Paket	24.989.999,00	Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi Bidang Prioritas Infrastruktur dan Lingkungan Berkelanjutan	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jembrana		16.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>				7 Paket	94.057.000,00	Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi Bidang Prioritas Infrastruktur dan Lingkungan Berkelanjutan	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jembrana		84.042.530,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>				2 Paket	6.579.950,00	Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi Bidang Prioritas Infrastruktur dan Lingkungan Berkelanjutan	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jembrana		3.101.800,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				32 Laporan	140.090.000,00	Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi Bidang Prioritas Infrastruktur dan Lingkungan Berkelanjutan	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jembrana		86.076.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<i>Persentase Pengadaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan</i>	-			100 %	151.200.000,00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi Bidang Prioritas Infrastruktur dan Lingkungan Berkelanjutan	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jembrana	-	151.200.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan</i>				1 Unit	151.200.000,00	Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi Bidang Prioritas Infrastruktur dan Lingkungan Berkelanjutan	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jembrana		151.200.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase Pemenuhan Kebutuhan Jasa Penunjang administrasi perkantoran yang diadakan</i>	-			100 %	169.174.000,00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi Bidang Prioritas Infrastruktur dan Lingkungan Berkelanjutan	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jembrana	-	280.600.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>				480 Laporan	4.800.000,00	Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi Bidang Prioritas Infrastruktur dan Lingkungan Berkelanjutan	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jembrana		4.800.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				12 Laporan	164.374.000,00	Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi Bidang Prioritas Infrastruktur dan Lingkungan Berkelanjutan	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jembrana		275.800.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase Pemenuhan Sarana Prasarana Perkantoran yang dipelihara dan dalam keadaan baik</i>	-			100 %	405.400.000,00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi Bidang Prioritas Infrastruktur dan Lingkungan Berkelanjutan	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jembrana	-	262.345.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya</i>				1 Unit	40.500.000,00	Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi Bidang Prioritas Infrastruktur dan Lingkungan Berkelanjutan	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jembrana		30.150.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>				16 Unit	310.400.000,00	Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi Bidang Prioritas Infrastruktur dan Lingkungan Berkelanjutan	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jembrana		145.750.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>				59 Unit	39.000.000,00	Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi Bidang Prioritas Infrastruktur dan Lingkungan Berkelanjutan	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jembrana		72.945.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				2 Unit	11.000.000,00	Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi Bidang Prioritas Infrastruktur dan Lingkungan Berkelanjutan	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jembrana		10.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				9 Unit	4.500.000,00	Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi Bidang Prioritas Infrastruktur dan Lingkungan Berkelanjutan	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jembrana		3.500.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
2.	1.05.03	<b>PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA</b>	<b><i>Persentase cakupan penyebaran informasi dan edukasi rawan bencana Persentase Penanganan Pasca Bencana Persentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana</i></b>	-			<b>100 % 80 % 95,55 %</b>	<b>892.985.370,00</b>						-	<b>1.264.512.393,00</b>	
	1.05.03.2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	<i>Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana</i>	-			100 %	57.859.000,00			Memperkuat penyelaras kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Bali Pulau Digital dan Keamanan Bali Bidang Prioritas Infrastruktur dan Lingkungan Berkelanjutan	Masyarakat/Warga yang berada di Kabupaten Jembrana	-	82.896.166,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.01.0007	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun</i>				3500 Orang	57.859.000,00	Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasn kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Bali Pulau Digital dan Keamanan Bali Bidang Prioritas Inf rastruktur dan Lingkungan Berkelanjutan	Masyarakat/Warga yang berada di Kabupaten Jembrana		82.896.166,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	<i>Persentase Warga Negara yang Memperoleh Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana</i>	-			7,13 %	706.596.370,00			Memperkuat penyelarasn kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Bali Pulau Digital dan Keamanan Bali Bidang Prioritas Inf rastruktur dan Lingkungan Berkelanjutan	Masyarakat/Warga Kabupaten Jembrana	-	1.007.647.427,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02.0015	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya</i>				50 Unit	50.440.620,00	Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasn kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Bali Pulau Digital dan Keamanan Bali Bidang Prioritas Infrastruktur dan Lingkungan Berkelanjutan	Masyarakat/Warga Kabupaten Jembrana		185.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02.0018	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota														
			<i>Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsian sarana prasarana dalam pengendalian operasi penanganan darurat bencana (per jenis ancaman) Kabupaten/Kota</i>				4400 Orang	74.960.000,00	Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasn kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Bali Pulau Digital dan Keamanan Bali Bidang Prioritas Infrastruktur dan Lingkungan Berkelanjutan	Masyarakat/Warga Kabupaten Jembrana		108.693.904,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02.0021	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/Kota yang berasal dari lintas sektor yang memiliki kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana</i>				0 Orang	0,00	Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasn kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Bidang Prioritas Kesehatan	Masyarakat/Warga Kabupaten Jembrana		0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02.0022	Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota														
			<i>Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun</i>				0 Dokumen	0,00	Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasn kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Bidang Prioritas Inf rastruktur dan Lingkungan Berkelanjut an	Masyarakat/Warga Kabupaten Jembrana		156.092.680,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02.0026	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya</i>				12 laporan	485.525.000,00	Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasn kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Bali Pulau Digital dan Keamanan Bali Bidang Prioritas Infrastruktur dan Lingkungan Berkelanjutan	Masyarakat/Warga Kabupaten Jembrana		461.754.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02.0028	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota														
			<i>Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana</i>				500 orang Kawasan	95.670.750,00	Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasn kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Bali Pulau Digital dan Keamanan Bali Bidang Prioritas Infrastruktur dan Lingkungan Berkelanjutan	Masyarakat/Warga Kabupaten Jembrana		96.106.843,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.05.03.2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	<i>Persentase Warga Negara yang Memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana</i>	-			100 %	128.530.000,00			Memperkuat penyelarasn kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Bali Pulau Digital dan Keamanan Bali Bidang Prioritas Infrastruktur dan Lingkungan Berkelanjutan	Masyarakat/Warga yang berada di Kabupaten Jembrana	-	173.968.800,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.03.0001	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas														
			<i>Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas</i>				1 Laporan	750.000,00	Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasn kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Bali Pulau Digital dan Keamanan Bali Bidang Prioritas Infrastruktur dan Lingkungan Berkelanjutan	Masyarakat/Warga yang berada di Kabupaten Jembrana		15.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.03.0002	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat</i>				1 Dokumen	1.500.000,00	Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyalarsan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Bali Pulau Digital dan Keamanan Bali Bidang Prioritas Infrastruktur dan Lingkungan Berkelanjutan	Masyarakat/Warga yang berada di Kabupaten Jembrana		15.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.03.0003	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota														
			<i>Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana</i>				35 Orang	124.410.000,00	Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyalarsan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Bali Pulau Digital dan Keamanan Bali Bidang Prioritas Infrastruktur dan Lingkungan Berkelanjutan	Masyarakat/Warga yang berada di Kabupaten Jembrana		123.968.800,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.03.0009	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana</i>				0 Orang	0,00	Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasn kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Bidang Prioritas Kesehatan	Masyarakat/Warga yang berada di Kabupaten Jembrana		0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.03.0012	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana														
			<i>Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kanupaten/Kota</i>				1 Laporan	1.870.000,00	Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasn kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Bali Pulau Digital dan Keamanan Bali Bidang Prioritas Inf rastruktur dan Lingkungan Berkelanjut an	Masyarakat/Warga yang berada di Kabupaten Jembrana		20.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
<b>J U M L A H</b>								<b>6.270.913.384,00</b>							<b>6.329.697.442,00</b>	